

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya bermaksud untuk menciptakan kemandirian termasuk pembangunan di pedesaan. Membangun daerah pedesaan dengan cara memberdayakan masyarakatnya dan juga meningkatkan produktivitas adalah salah satu misi dari pemerintah. Usaha pribadi masyarakat sangat diperlukan agar tersukseskannya program yang dilaksanakan. Sarana dan prasarana disediakan oleh Negara untuk mendukung program pemberdayaan tersebut (Rozikin, 2012).

Iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi akan menghasilkan kemajuan ekonomi nasional. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan berhasil jika kabupaten mempunyai aktivitas ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi di kabupaten mampu berhasil berkat adanya bantuan dari ekonomi pedesaan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Perbaikan akses terhadap empat hal yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan demi menghasilkan pendapatan yang lebih besar (Maharani, 2019).

Sejak kebijakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam Undang-Undang tersebut mengatur apa yang berkaitan dengan desa, mulai dari pemerintahan, kewenangan desa, serta lembaga atau badan usaha desa yang bertujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Fajar Sidik dalam Rasanzani (Rafsanzani, et.al., 2010) pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki desa untuk kesejahteraan

masyarakat. Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional.

Atas aturan tersebut, untuk lancarnya pelaksanaan pembangunan yang akan di jalankan pemerintah, maka pemerintha mengeluarkan kebijakan untuk menangani pembentukan lembaga yang modern dari segi struktur dan landasan hukum. Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu contoh kebijakan pemerintah memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah desa. Guna peningkatan Pendapatan Asli Desa Lembaga yang berbasis ekonomi menjadi salah satu yang dijalankan desa. Mencari keuntungan lewat kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat adalah tujuan dari BUMDes yang mempunyai fungsi sebagai lembaga komersial melalui negosiasi sumber daya lokal. BUMDes memberikan keterlibatan yang positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam membangun perekonomian masyarakat dan khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Alkadafi, 2014).

BUMDes dapat diistilahkan sebagai social enterprise. BUMDes merupakan lembaga yang sebagian besar modal dari Desa yang akan beguna untuk berbagai usaha untuk kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Seperti yang sudah tertera dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah desa bahwa BUMDes didirikan melalui musyawarah desa (UU No 6 tahun 2014 pasal 88 ayat 1).

BUM Desa dijadikan sebagai lembaga *social enterprise* yang menjalankan bisnis usaha desa untuk pemberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi dari keuntungan bisnis usaha yang dihasilkan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayah perdesaan. BUM Desa difungsikan sebagai penggerak perekonomian di pedesaan (Sidik & Nasution, 2018). Prabowo telah menunjukkan bahwa unit usaha keuangan mikro yang dikelola BUM Desa dapat membantu keluarga miskin (Prabowo, 2014).

Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di pasal 1 ayat 2 menyebutkan kesejahteraan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

BUMDes dapat difungsikan sebagai instrumen untuk melakukan kegiatan pemberdayaan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas di desa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. BUM Desa menjadi wadah kolektivitas usaha bersama warga desa yang mensinergikan berbagai potensi lokal desa dan sumber daya masyarakat, memperkuat jaringan-jaringan sosial, dan membangun kebersamaan mengatasi permasalahan sosial di desa/kelurahan. Pemberdayaan sosial dilakukan pemerintah

desa sebagai upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga desa yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat 10).

Selain pemberdayaan sosial dalam pemberdayaan juga dikelola oleh pemerintah desa dengan menggunakan kemitraan yang dinamakan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Pemberdayaan mempunyai makna harafiah membuat seseorang dan kelompok berdaya. Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan dalam arti mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Didalam pemberdayaan terkandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang melalui penegasan hak dan kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tatanan kehidupan. Proses pemberdayaan diusahakan agar orang lain berani menyuarakan dan memperjuangkan ketidak seimbangan hak dan kewajiban. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dan orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Rosaia dalam Indriyati (Indriyati, dkk, 2009) menyebutkan dengan meningkatnya kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi akan mengangkat pula penghasilan dan kesejahteraan keluarganya, yang selanjutnya akan mampu mempengaruhi perempuan lain agar mau ikut ambil bagian dalam peningkatan ketrampilan dan pengetahuan, sehingga akhirnya mampu pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses pemberdayaan perempuan ini diajak untuk mengenali dulu apa yang menjadi kebutuhan riil perempuan baik kebutuhan praktis maupun kebutuhan strategis, dan permasalahannya. Dengan mengetahui kebutuhannya sendiri

diharapkan mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Sehingga perempuan sendirilah yang menentukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari solusi yang ditentukan. Sasaran program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan. Soegiharto (2011) menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat terutama perempuan sebagai kader dalam ketahanan pangan lokal.

Pemberdayaan ekonomi perempuan adalah suatu upaya untuk membangun kemampuan masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga dengan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Pemberdayaan ekonomi juga terkait dengan akses kaum perempuan terhadap sumber daya yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomis. Tujuan akhir dari pemberdayaan ekonomi ini adalah perempuan dapat secara utuh mengontrol pendapatannya kemandirian secara ekonomi. Menurut Widuri, E. (2008) Penyebab rendahnya kualitas sumber daya perempuan sebagian berasal dari dalam diri perempuan itu sendiri (faktor internal), dan sebagian lagi berasal dari luar (faktor eksternal). Faktor internal perempuan antara lain: masih rendahnya dan terbatasnya motivasi perempuan di dalam meningkatkan dirinya untuk maju, sikap menerima dan pasrah terhadap keadaan, merasa rendah diri, tidak berdaya serta tidak mandiri. Adapun faktor eksternal perempuan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyangkut nilai-nilai budaya masyarakat, tidak komprehensifnya penterjemahan ajaran agama, aturan hukum

dan kebijakan serta pola pengambilan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan yang masih bias gender.

Di bawah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, BUM Desa dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan usaha desa wisata alam dengan Dana Desa (Viva, 2016). Dari tahun 2015-2019, Dana Desa diberikan kepada kepada 74.958 oleh Pemerintah Pusat dengan rata-rata sebesar Rp 1 Milyar setiap desa (Kementerian Keuangan, 2018). Kementerian Desa mendorong agar Dana Desa dimanfaatkan untuk mendirikan dan mengembangkan BUM Desa sebagai upaya mengakselerasi dalam mereduksi kemiskinan desa (Kompas, 2015). Sebab, Kementerian Desa mencatat jumlah desa tertinggal mencapai 40-45 persen dari total 74.958 desa (Kompas, 2017a).

Hanya dalam kurun waktu dua tahun berjalan, BUM Desa meningkat signifikan, yaitu dari 1.022 unit pada tahun 2014 menjadi 21,811 unit pada tahun 2017 (Kompas, 2017b; The Jakarta Post, 2017a). BUM Desa menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat dan berkomitmen membentuk 40.000 unit BUM Desa (Kompas, 2015). Namun, masalah utama yang dihadapi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak BUM Desa (sekitar 65 persen dari jumlah total 12.848 unit pada tahun 2016 yang telah berdiri) belum mampu aktif-produktif, normatif, dan formalitas (Yulianto, 2017). Dilatarbelakangi permasalahan serius ini, penelitian kemudian dilakukan pada BUM Desa di Desa Ponggok.

BUM Desa di Desa Ponggok dijadikan sebagai lokasi penelitian karena menjadi desa percontohan nasional (Kompas, 2016; The Jakarta Post, 2017b) dalam pemberdayaan masyarakat menurut Pemerintah Pusat. Secara administrasi wilayah,

Umbul Pongkok berada di Desa Pongkok namun bukan aset milik Desa Pongkok, sebab umbul pongkok adalah sumber mata air yang fungsi utamanya untuk irigasi pertanian di bawah Kementerian PU Pusat. BUM Desa saat ini mengelola unit usaha pemandian umbul Pongkok, umbul ciblon, toko desa, penyewaan kios, penyewaan kolam ikan, dan pelayanan air bersih (PAB). Dari unit-unit usaha yang dijalankan, unit usaha pemandian umbul pongkok merupakan penghasil pendapatan paling besar yang diperoleh BUM Desa Penelitian ini sangat penting dilakukan di Desa Pongkok sebagai salah satu desa terbaik dan percontohan nasional karena mendapat kritik yang mendasar terhadap tujuan idealnya (Sidik, Nasution, & Herawati, 2018).

Pemerintah Desa Pongkok juga membuka akses untuk memberdayakan kelompok perempuan (PKK) melalui kemitraan untuk menjalankan bisnis usaha kecil mikro lokal khas desa di area umbul pongkok. Dari gagasan pemerintah desa setempat, BUMDes bekerjasama dengan kelompok perempuan (PKK) mengembangkan Usaha Kecil Mikro berupa makanan ringan olahan ikan nila untuk dijual kepada pengunjung. Produk makanan ringan olahan berbahan ikan nila yang dihasilkan oleh PKK (Sidik, 2020).

Untuk menyerap tenaga kerja yang optimal, UKM membagi kelompok kerja dari enam RW yang ada di Desa Pongkok menjadi kelompok PKK dengan 8-15 orang per kelompoknya yang memproduksi varian olahan ikan nila diantaranya ; nugget, bakso ikan, otak-otak, abon nila dll. Dengan begitu perempuan yang tidak bekerja bisa diberdayakan untuk menjadi sejahtera dan bisa menambah atau memenuhi kebutuhan hidup (Sidik, 2020). Pemberdayaan perempuan masyarakat yang

dilakukan Pemerintah Desa maupun BUMDes telah membuka lapangan pekerjaan dan kegiatan ekonomi yang ada di Ponggok.

Di masa pandemi yang masih terjadi, peran PKK dalam peningkatan ini juga termasuk dalam program PKK dengan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan datangnya masa pandemi ini membuat PKK harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang serba terbatas secara otomatis akan mengganggu ekonomi keluarga. Menurut Mulyani selaku Bupati Klaten (Solopos, 2021) PKK digandeng untuk menggerakkan kegiatan ekonomi kerakyatan terutama dari para kaum hawa. Kegiatan-kegiatan pemulihan ekonomi sudah digulirkan TP PKK sejak 2020 dan berlanjut tahun ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana pemberdayaan ekonomi perempuan dalam peningkatan usaha ekonomi produktif melalui program BUMDes di Desa Ponggok?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, penelitian ini bertujuan mengetahui pemberdayaan ekonomi perempuan dalam peningkatan usaha ekonomi produktif yang dilakukan pemerintah Desa Ponggok, sehingga didapati proses mekanisme kerja dan kendala yang dihadapi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat keilmuan secara umum, khususnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan BUMDes.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran kepada pemerintah dan masyarakat untuk bergotong royong melakukan pemberdayaan perempuan yang memanfaatkan komunitas desa serta memerikan gambaran proses mekanisme kerja yang berbasis komunitas desa.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 1.1
Tinjauan Pustaka

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Kurnianto, H., & Anggraini, Y. (2019)	Pemberdayaan perempuan dalam pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) melalui pemanfaatan potensi sektor pertanian (Studi kasus di Desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong BUMDes desa Kadu Ela menjadi pembuka bagi keterlibatan perempuan pada BUMDes melalui pemberdayaan. Program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan pada tahap penyuluhan dan pelatihan sudah berjalan namun belum maksimal pada kegiatan pendampingan, monitoring, evaluasi, strategi promosi dan pemasaran. Sehingga program pemberdayaan perempuan belum secara komprehensif dan berkesinambungan dengan memaksimalkan potensi sektor pertanian dan ketahanan pangan

			masyarakat.
2.	Sintya, L., & Nurjihadi, M. (2021)	Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Lunyuk	Pemberdayaan perempuan yang berfokus pada program pemanfaatan pekarangan lestari (P2L) harus diprioritaskan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Lunyuk.
3.	Nawang Sari, E. R. (2018)	Pemberdayaan Perempuan Melalui BUMDes Dalam Produksi Makanan Camilan Di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	Meningkatnya pengetahuan ibu rumah tangga dalam pengelolaan camilan. Penyuluhan dan pelatihan dalam pemasaran secara online juga diterapkan, kedepannya diharapkan dapat memasarkan melalui media sosial atau website.
4.	Rahmi, V. A., Ismanto, H., & Fathoni, M. Z. (2020)	Inovatif saat Pandemi Covid "Pelatihan Kewirausahaan Khas Perempuan Berbahan Sampah "Kolaborasi BUMDes"	Pelaksanaan kewirausahaan yang berbasis pengetahuan khas perempuan yang diharapkan agar dalam pengimplementasiannya dapat dimengerti dengan mudah. Keberhasilan dalam pengabdian dari hasil kolaborasi akademisi dengan BUMDes dan ASBAG (Asosiasi Bank Sampah Gresik yang menghasilkan produk ompos dan starter kompos yang dibuat oleh peserta pelatihan.
5.	Sulistyoningsih, E. D. (2017, November)	<i>Push Factor</i> Partisipasi Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Pedesaan (BUMDes) (Studi Kasus Faktor Pendorong Partisipasi Perempuan Dalam Upaya Membangun BUMDes Di Desa Serang Kecamatan Karangreja	Partisipasi perempuan dalam BUMDes yang dilaksanakan atas dasar adanya ijin dari suami, namun masih terikat oleh syarat-syarat yang diajukan oleh suami. Hal ini, suami mengizinkan perempuan melakukan kegiatan apapun asal urusan yang menyangkut rumah dan anak sudah beres. Dalam hal ini perempuan belum mempunyai kuasa dalam

		Kab.Purbalingga)	mengubah posisi diri.
6.	Zuhrah, Z., Mahmudah H., & Juhriati, Jm (2020)	Pemberdayaan Perempuan Dalam Program BUMDes Desa Belo	Dengan adanya kegiatan ini ara perempuan mendalami kreativitas dengan mengolah bahan menjadi bisini yang ternilai contohnya seperti makanan dan pakaian. pengolahan bandeng presto yang memiliki waktu penyimpanan yang lebih lama bila dibandingkan dengan olahan bentuk lain. Selain itu, produksi kain tenun yang biasa di pasarkan di daerah setempat namun sekarang sudah bisa dipasarkan di daerah luar sehingga nilai jual juga semakin tinggi.
7.	Mustanir, A.(2018)	Pemberdayaan Perempuan Anggota Badan Usaha Milik Desa dengan Pemanfaatan Lahan Kebun Bibit Desa	Kegiatan yang dilakukan dengan metode sosialisasi dan pendampingan pemberdayaan perempuan anggota BUMDes atau kelompok perempuan tani memiliki kepedulian tinggi yang bertujuan untuk memajukan BUMDes Desa Sipodeceng.penyuluhan berorganisasi juga penting demi membuka wawasan baru kaum perempuan didalam mengembangkan pertanian.
8.	Winarti, S. E., Herawati, H., & Sidik, F. (2020)	Pemberdayaan Kelompok Perempuan Berbasis Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ponggok Kabupaten Klaten	Pemberdayaan kelompok perempuan yang berbasis BUMDes mengembangkan produk lokal khas desa di are desa wisata dan mampu memberikan peningkatan pendapatan tambahan bagi kelompok perempuan. Namun, faktanya hasil keuntungan masih di dominasi oleh kempok perempuan (PKK) pusat dibandibngkan perempuan yang dibina kelompok

			perempuan tingkat.
9.	Subehi, F., Luthfi, A., Mustofa, M. S., & Gunawan, G. (2020)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten	Pengelolaan modal dan potensi desa mealui BUMDes Tirta Mandiri yang melibatkan masyarakat berhasil meningkatkan kesejahteraan warga. Ada beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang diantaranya sumberdaya manusia, teknologi dan persaingan antar usaha. Namun demikian kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah mampu mengatasi hambatan dan menjadikan BUMDes menjadi Jembatan dalam pemberdayaan ekonomi warga.
10.	Ulfa, R.M (2019)	Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Dalam BUMDes Bersama Melalui Program SPP Studi Deskriptif di Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi	Hasil dari kegiatan pendampingan dilakukan dengan memotivasi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan pendampingan dalam perluasan pemasaran untuk kelompok SPP. Kegiatan pelatihan juga dilakukan dengan memberikan pelatihan administratif dengan pemberian skill yang akan dipergunakan untuk melakukan pembuatan proposal pinjaman.
11.	Siti Utami Nurfadillah	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program UP2K-PKK di Desa Kayuambon Lembang	Program UP2K-PKK sudah cukup berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kayuambon Lembang. Saran yang di berikan adalah Program UP2K-PKK Desa Kayuambon lembang harus lebih aktif, inovatif dalam melaksanakan program tersebut sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa

			Kayuambon Lembang secara merata.
12.	Wyati Saddewisasi, Sri Haryati, D.C. Kuswardani	PKM Usaha Ekonomi Produktif Kelompok PKK Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal	Kuantitas maupun kualitas produksi meningkat. Sebagai gambaran hasil pengabdian ini untuk alat oven bisa meningkatkan jumlah produksi sekali proses hingga 4 (empat) kali dari sebelum adanya oven baru. Disamping itu alat vacum dan sealer serta spiner meningkatkan kualitas produksi yang pada awalnya belum menggunakan alat tersebut. Untuk pemahaman tentang bidang keuangan dan pemasaran masih perlu pendampingan lebih lanjut
13.	Muh. Shofi	Pemberdayaan Anggota PKK Melalui Pembuatan Lilin Aromaterapi	Masyarakat mengetahui manfaat dari lilin aromaterapi bagi kesehatan dan cara membuat lilin aromaterapi. Selama proses kegiatan berlangsung mulai dari penyampaian tujuan dan peragaan sampai dengan mempraktikkan sendiri, peserta sangat antusias melaksanakannya. Hal ini dapat dilihat dari banyak pertanyaan yang mereka sampaikan pada saat praktik. Berdasarkan hasil kuisisioner tentang manfaat dan pembuatan lilin aromaterapi menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 100% bila dibandingkan sebelum pelaksanaan pengabdian masyarakat. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan pelatihan pembuatan lilin aromaterapi berhasil dilaksanakan.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Zubaedi, 2013:24)

Menurut Karl Mark dalam buku Ilyas Supena pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum powerles untuk memperoleh surplus value sebagai hak normatifnya (Supena, 2017). Pemberdayaan merupakan langkah untuk meningkatkan peran aktif masyarakat serta berupaya untuk menggali potensi akan sumber daya yang ada. Pemberdayaan merupakan makna membuat orang menjadi berdaya. Istilah lain untuk pemberdayaan adalah penguatan atau empowerment, dimana kekuatan tersebut berasal dari diri sendiri yang digunakan untuk mendorong terjadinya perubahan, sehingga pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Menurut Safri Miraj dan Sumarno dalam Suparjan dan Hempri (Suparjan dan Hempri: 2007, p.186) menyebutkan bahwa ada tiga strategi pemberdayaan yang harus direalisasikan kepada masyarakat untuk dapat di berdayakan diantaranya, pemberdayaan secara politis, sosial, dan ekonomi yang diharapkan dapat mengatasi dan membantu atau paling tidak meminimalisir dampak-dampak negatif dari agenda neoliberalisme sehingga upaya untuk mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan dan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat dapat terwujud

Ada beberapa tahap pemberdayaan menurut Sulistiyani (Sulistiyani, 2004, p.83). (1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tahap ini lebih menekankan pada sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisi kehidupan saat ini; (2) Tahap proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung baik, penuh dengan semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi dengan baik; (3) Tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan keterampilan yang diperlukan, agar mereka dapat membentuk kemandirian.

Pemberdayaan merupakan langkah untuk meningkatkan peran aktif masyarakat serta berupaya untuk menggali potensi akan sumber daya yang ada. Pemberdayaan merupakan makna membuat orang menjadi berdaya. Istilah lain untuk pemberdayaan adalah penguatan atau empowerment, dimana kekuatan tersebut berasal dari diri sendiri yang digunakan untuk mendorong terjadinya perubahan, sehingga pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Pemberdayaan masyarakat biasa dipahami atau diartikan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Adapula pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama

padasebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya.

Pemberdayaan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pembinaan dan mengasah keterampilan perempuan khususnya dalam penelitian ini yaitu dibidang Home Industry. Proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia, yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja (Hogen, Christine. 2000). Hal ini juga berlaku pada suatu masyarakat, dimana dalam suatu komunitas proses pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program, baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Proses pemberdayaan akan berlangsung selama komunitas itu masih tetap ada dan mau berusaha memberdayakan diri mereka sendiri.

Pemberdayaan perempuan juga dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan pemberdayaan perempuan menjadi cita cita semua orang. Namun untuk mengetahui keberhasilannya. Adapun indikator pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.
- b. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka.
- c. Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki.
- d. Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan pemerintahan.
- e. Peningkatan keterlibatan aktivis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan.

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses dan kontrol perempuan dan laki-laki di semua bidang pembangunan. Program-program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selama ini merupakan upaya untuk senantiasa mewujudkan terciptanya dan terdistribusinya manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara berimbang. Berbagai langkah dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan (Marwanti, 2012).

Menurut Wasman dkk dalam Riant Nugroho (Riant Nugroho, 2008) ada beberapa program pemberdayaan perempuan yang ditawarkan yaitu :

- a. Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Seperti misalnya PKK (Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga), perkumpulan koperasi maupun yayasan sosial. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol.

- b. Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada, kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat
- c. Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan

- d. Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

Pemberdayaan pada kaum perempuan adalah usaha untuk meningkatkan atau mendorong kaum perempuan agar mampu meningkatkan kemampuannya. Pemberdayaan ini sangat diperlukan karena dalam kehidupan sehari-hari

perempuan sering mengalami keterbatasan dalam mengaktualisasikan dirinya. Keterbatasan tersebut menyebabkan perempuan kurang dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi keluarga. Adapun keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja, hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga serta kendala tertentu (Wasman, 2016).

Menurut Listyani (Listyani, 2016) terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk membangun wirausaha perempuan, yakni:

- a. Mendorong komunitas perempuan agar memiliki kekuatan dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup untuk keluarga mereka dalam bentuk kegiatan berbisnis (ekonomi) yang kemudian secara berlahan akan berdampak kepada perubahan nilai-nilai sosial, pendidikan, budaya dan politik.
- b. Menyelenggarakan proses pemberdayaan yang lebih menekankan pada cara berpikir mengoptimalkan sumber daya dan proses bekerja sama dalam komunitas perempuan sebagai aktor utamanya di dalam suatu tahapan kegiatan

1.6.2 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Menurut Aslichati, L. (2011) Pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumber-sumber, dan struktur jalur yang menunjang. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga perempuan mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat

memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antar peran kodrat dengan peran gender.

Menurut Putri, D. K. (2018) Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, konsumsi barang dan jasa. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi. Penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan pemberdayaan ekonomi perempuan adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan perempuan untuk menambah penghasilan atas apa yang sudah dikerjakan melalui kegiatan usaha perekonomian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga.

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat seringkali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah umumnya untuk meningkatkan ekonomi dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat ini, tampaknya terus didukung dan dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman dan daya saing di era globalisasi, tujuannya agar masyarakat tidak ketinggalan zaman dan memiliki daya saing ditengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri

untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan. Pemahaman atas perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender masih sangat rendah. Seringkali kegagalan usaha mereka ini disebabkan oleh pengotakan peran suami dan istri yang masih belum memahami kesetaraan gender, sehingga pekerjaan rumah tangga masih menjadi tanggung jawab perempuan dan memenuhi kebutuhan ekonomi adalah tugas suami. Hal inilah yang menyebabkan hambatan bagi para perempuan baik yang sudah memiliki usaha maupun yang belum. Menurut Listyani (Listyani,2016) terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk membangun wirausaha perempuan, yakni:

- a. Mendorong komunitas perempuan agar memilih kekuatan dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup untuk keluarga mereka dalam bentuk kegiatan berbisnis (ekonomi) yang kemudian secara perlahan akan berdampak kepada perubahan nilai-nilai social, Pendidikan, budaya dan politik.
- b. Menyelenggarakan proses pemberdayaan yang lebih menekankan pada cara berpikir, mengoptimalkan sumber daya dan proses bekerjasama dalam komunitas perempuan sebagai peran umanya di dalam suatu tahapan kegiatan.

Untuk mencapai tujuan dan meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlu strategi dan langkah-langkah efektif sehingga cepat dan tepat dalam melakukannya. Menurut Nugroho(2008) menerangkan bahwa melakukan pemberdayaan perempuan perlu tiga langkah yang berkesinambungan, yaitu:

- a. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan daripada laki-laki.
- b. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
- c. Perlindungan, artinya mendapatkan proteksi dari kekerasan dan ketidakadilan.

Selain langkah-langkah di atas, bisa juga menggunakan langkah-langkah pemberdayaan perempuan demi meningkatkan ekonomi perempuan yang dikutip oleh Herri dkk (2009), bahwa ada lima langkah dalam pemberdayaan perempuan, di antaranya:

- a. Membantu dan mendorong kaum perempuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri mereka melalui berbagai program pelatihan.
- b. Membantu kaum perempuan dalam strategi usaha dan pemasaran produk.
- c. Memberikan pemahaman terhadap regulasi dan peraturan pemerintah terkait dengan legalitas dunia usaha.
- d. Mendorong dan membantu kaum perempuan untuk mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.
- e. Membuat usaha mikro, jaringan usaha mikro perempuan, forum pelatihan usaha.

Menurut Ambat Teguh (2004:83), pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri dan kemudian dilepas untuk mandiri meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat

dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, sehingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Ada beberapa tahap yang perlu di lalui menurut Ambar Teguh (2004:83):

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan dan ketrampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantar pada kemandirian.

1.6.3 Ekonomi Produktif

Menurut Mohammad Rohedi dalam Buchari Alma (Buchari Alma, 2007:01) Dalam melakukan pemerataan perekonomian bangsa Pemerintah harus lebih memfokuskan perhatiannya kepada wirausahawan kecil menengah dan besar, karena kedudukan para wirausahawan dalam membangun kekuatan ekonomi rakyat terlihat lebih nyata. Wirausahawan mampu menampung tenaga kerja baru dan hal ini tentu dapat meringankan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja. Usaha Ekonomi Produktif salah satu kegiatan dibidang ekonomi yang dilaksanakan oleh

masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat yang berasal dari tangan masyarakat itu sendiri dengan keahlian sendiri. Contoh dari usaha ekonomi produktif dengan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

UMKM (Unit Mikro Kecil dan Menengah) masih berperan penting dalam menampung tenaga kerja, terutama bagi tenaga kerja muda yang belum berpengalaman atau baru pertama kali memasuki dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM masih memiliki keunggulan yang cukup dalam menyerap tenaga kerja perkotaan dan pedesaan, namun disisi lain karena masih menggunakan alat-alat tradisional dengan tingkat Pendidikan dan ketrampilan yang rendah, serta menggunakan teknologi yang sederhana maka akan mempengaruhi pendapatan yang akan dihasilkan. Dengan kondisi seperti itu, tentunya pendapatan yang dihasilkan tidak akan maksimal. Namun nyatanya, UMKM dapat sepenuhnya menopang perekonomian nasional tanpa dukungan pemerintah (Ramadhan, 2012).

1.6.4 Badan Usaha Milik Desa

Menurut Candra, F. U. (2021) BUMDes adalah badan usaha yang menjalankan fungsi sosial dan memberikan layanan kepada masyarakat desa dalam dunia usaha sebagai Lembaga penguatan ekonomi desa. BUMDes tidak hanya menjadi motor penggerak perekonomian desa, tetapi juga menjadi motor penggerak perekonomian desa. Artinya, pembentukan BUMDes bukan hanya orientasi pada lembaga laba yang mencari keuntungan, tetapi pembentukan BUMDes harus mampu memberikan manfaat ekonomi dan social bagi masyarakat desa (Mastur,2018). Siagian (2003) memahami pembangunan sebagai suatu usaha atau

rangkaian pertumbuhan dan perubahan usaha yang secara sadar direncanakan dan dilaksanakan ke arah modernisasi dalam kerangka pembangunan bangsa. pada dasarnya, pembangunan adalah Latihan yang disengaja antara pemerintah yang melibatkan masyarakat ke arah perencanaan dengan arah modern.

Menurut Edy Yusuf dalam Sa'dullah (Sa'dullah, 2016) Desa memegang peranan penting dalam upaya pembangunan nasional, karena penduduk Indonesia cenderung tinggal di pedesaan, sehingga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap upaya membangun stabilitas di negara. Selanjutnya status desa dianggap strategis dalam pembangunan nasional, karena desa merupakan basis untuk mengidentifikasi permasalahan masyarakat untuk merencanakan dan mencapai tujuan nasional di tingkat desa (Sidik, 2015). Budiono (2015) menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah pusat memberdayakan pemerintah desa untuk mengelola batas desa secara mandiri melalui Lembaga ekonomi desa.

Menurut Edy Yusuf dalam Gunawan (Gunawan, 2011) pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnyayang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Sayutri (2011) mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengetasan kemiskinan. Menurut Esy Yusuf dkk dalam Hardijono (Hardijono dkk, 2014)

bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Pemberdayaan Perempuan

Menurut pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan adalah suatu kegiatan untuk memberdayakan perempuan sehingga memperoleh kontrol atas sumber daya, ekonomi politik sehingga perempuan dapat berorganisasi dan mengembangkan kepercayaan diri.

1.7.2 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Menurut pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan peningkatan kemampuan dan ketrampilan perempuan untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga.

1.7.3 Ekonomi Produktif

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan ekonomi produktif adalah mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan dalam menjalankan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah demi menopang perekonomian.

1.7.4 Badan Usaha Milik Desa

Dari beberapa pengertian diatas, BUMDes menjadi suatu bentuk partisipasi masyarakat secara kekeseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa. BUMDes juga menciptakan pemerataan wilayah usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

1.8 Definisi Operasional

Tabel 1.2
Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter	Sumber Data
1.	Pemberdayaan perempuan melalui ekonomi produktif	Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku	Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara untuk pengenalan pemberdayaan pada masyarakat	Sulistyani dalam buku Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Penerbit Gaya Media Yogyakarta 2004
		Proses pemberdayaan	Jenis dan cara pemberdayaan perempuan yang ada di Desa Ponggok dengan output peningkatan ekonomi produktif	
		Keberdayaan masyarakat	Dampak dari pemberdayaan perempuan sebagai peningkatan ekonomi produkti di Desa Ponggok	

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Menurut Andi Prastowo (2012) menjelaskan pendekatan penelitian merupakan cara mendekati objek penelitian. Pendekatan mengandaikan penggunaan salah satu sudut pandang yang dianggap paling relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun pengertian metode kualitatif mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data tersebut berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Penelitian yang akan dilakukan adalah aktivitas pemberdayaan perempuan sebagai penggerak ekonomi produktif di Ponggok.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Desa Wisata Ponggok Kabupaten Klaten. Dengan narasumber yang akan diwawancarai Pemerintahan Desa Ponggok, Pengelola BUMDes, Kelompok PKK dan anggota PKK. Alasan pemilihan lokasi adalah karena dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan menggunakan Badan Usaha Milik Desa dapat membantu meningkatkan ekonomi desa melalui pemberdayaan perempuan.

1.9.3 Data dan Sumber Data

Sumber data yang di pakai dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu:

- a. Data Primer

Sumber data adalah yang memberikan data langsung kepada pengumpul data (Sugiono, 2013). Peneliti mengumpulkan data mentah untuk menjawab peneliti. Data primer tersebut berupa opini, subjek, dan pengamatan terhadap Tindakan atau peristiwa (Purhantara, 2010). Dalam penelitian skripsi, sumber data primer adalah pengelola BUMDes Tirta Mandiri, Kepala Desa Ponggok, Kelompok PKK dan anggota PKK.

Tabel 1.3
Data Primer

No	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Potensi yang dimiliki perempuan dalam peningkatan ekonomi produktif dan profil data Desa Ponggok	Yani Stiadi, S.Sos. (Sekretari Desa Ponggok)	Wawancara
2.	Pelaksanaan pemberdayaan perempuan Desa Ponggok	Ratnasari Irawati (Ketua Kelompok PKK Desa Ponggok) Yasmin (Sekretaris Badan Usaha Milik Desa Ponggok) Ibu Ari (waki ketua Kelompok PKK) Ibu Zuri (Sekretaris PKK) Ibu Nur (Anggota PKK)	Wawancara

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi (Sugiono, 2013). Penunjang data sekunder berasal dari buku tentang Pengelolaan BUMDes, laporan dan dokumen-dokumen, dokumentasi kegiatan lapangan, jurnal skripsi.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih banyak dan mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas desa (studi terhadap pemberdayaan perempuan menggunakan BUMDes desa Ponggok Kabupaten Klaten). Wawancara ini dilakukan kepada Pemerintahan Desa Ponggok, Pengelola BUMDes, Kelompok PKK dan anggota PKK.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data yang berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Adapun data yang bisa diperoleh yaitu dengan mencari data, atau informasi buku-buku, catatan-catatan, gambar, biografi, dll. Yang data itu berkaitan dengan pemberdayaan perempuan desa Ponggok melalui BUMDes. Dalam hal ini data bisa diperoleh dari pemerintahan desa Ponggok,

pengelola BUMDes, pengelola pemberdayaan perempuan, meliputi foto-foto kegiatan dan keadaaan masyarakat Ponggok.

1.9.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiono, 2009: 89).